

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Terkait Kinerja Kepala Desa Tanjung Seru Yaitu: Dalam aspek memberikan dan menyebarkan informasi kepada masyarakat, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya melalui musyawarah desa, sosialisasi, rapat, surat pemberitahuan, dan media komunikasi lainnya, namun informasi belum diterima secara merata oleh seluruh masyarakat karena rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan desa. Dalam aspek penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan, Kepala Desa telah melaksanakan kewajibannya melalui forum musyawarah desa, tetapi tingkat kehadiran masyarakat yang masih rendah menyebabkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat belum terwujud secara maksimal. Sementara itu, dalam aspek pengayoman kepada masyarakat, Kepala Desa telah berupaya memberikan pelayanan, pembinaan, penyelesaian konflik, serta menjaga keamanan dan ketertiban desa, namun pelaksanaannya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat karena masih terdapat warga yang merasa kurang diperhatikan dan belum memperoleh respons yang cepat terhadap permasalahan yang dihadapi.

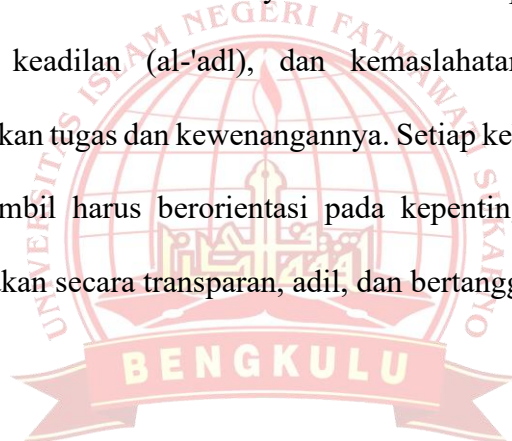
2. Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terkait Kinerja Kepala Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyyah yaitu: Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kinerja Kepala Desa Tanjung Seru juga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip amanah, keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (maslahah). Prinsip amanah belum terlaksana secara maksimal karena keterbukaan informasi kepada masyarakat masih terbatas, prinsip keadilan belum terwujud secara optimal karena akses masyarakat terhadap informasi dan partisipasi belum merata, sedangkan prinsip kemaslahatan belum tercapai secara maksimal karena rendahnya keterlibatan masyarakat menyebabkan aspirasi dan kebutuhan warga belum sepenuhnya terakomodasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait kinerja Kepala Desa di Desa Tanjung Seru masih memerlukan perbaikan guna mewujudkan pemerintahan desa yang lebih transparan, adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyyah.

B. Saran

1. Kepala Desa diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media informasi desa, seperti musyawarah desa, papan informasi, media sosial, maupun sarana Komunikasi lainnya. Selain itu, Kepala Desa perlu meningkatkan Komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat agar informasi

mengenai program, kegiatan, serta kebijakan desa dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Pemerintah Desa dan perangkat desa perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, perangkat desa perlu membantu Kepala Desa dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksana secara optimal.
3. Dalam perspektif Siyash Tanfidziyyah, Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa hendaknya senantiasa berpegang pada prinsip amanah, keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (maslahah) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta dilaksanakan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rojak Jeje, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

A. Shumpeter, Josep, *Capitalisme, Socialisme, And Democracy*, New York : Routledge, 1994.

Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.

Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Djazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2011.

Huda, Ni'matul, *Dalam Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.

Hanif, Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

HR, Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ibrahim Jindan, Khalid, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002).

Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Mahmud Marzuki, Peter, "Penelitian Hukum." *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55, 2005.

Mu'iz Raharjo, Muhamad, *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa* Jakarta: Rajawali Press, 2021.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.

Mangkunegara, Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Mazmanian, Daniel A. dan Paul A. Sabatier, Paul A, *Effective Policy Implementation*, Lexington, Massachusetts: Lexington Books, 198.

Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia, 2003.

Ndraha, Taliziduhu, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Rosyada, Dede, *Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, cet 1, 2000.

Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, : Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Syarif, Ibnu, *Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh siyasah, Doktrin dan Pemikiran Polink Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, 1986.

Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017.

Schmitter, Philippe Schmitter, *The Long Road To Democracy*, Jakarta : Habibie Center, 2004.

Sakti Hadiwijoy, Suryo, *Negara Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.

Sedarmayanti, "*Kepemerintahan Yang Baik*" Bagian Kedua Edisi revisi, Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012.

Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Situmorong, Ubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, Bandung CV Pustaka Setia, 2012.

Surjadi, A, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Thoha, Miftah, *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pressindo, 2002.

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1994.

Young, Kimball, *Handbook of Social Psychology*. London: Routledge and Kegan Paul, 1995.

B. Jurnal Dan Tesis

Akbar, Muhammad Naufal Al. "Kinerja Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu." *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1 (2025).

Abdul Jafar, Wahyu, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.

- Agustin, Lidiya, "Kewenangan Kepala Desa dalam Pelaksanaan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbasis Good Governance di Kecamatan Pangkalan Kerinci", Tesis Oleh: Program studi ilmu Hukum, program pasca sarjana, universitas islam riaup pekan baru, 2022.
- Azhari, Awang, "Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan", Tesis Oleh: Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2024.
- Fatimah, Ega. "Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Melakukan Pelayanan Administrasi Pada Kantor Desa Pinayungan." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 5 (2023).
- Handraini, Helti. "Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia." *Jurnal Jurnal Komunikasih Dan Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 2 (2024).
- Mayyadah, Putri. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu Putri." *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 11, No. 1 (2025).
- Nugraha, Gusti Made Bayu. "Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3 (2021).
- Ramdani, Arsa. "Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol. 13, No. 2 (2025).
- Rizal, Muhammad. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Berimplikasi Pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)." *IndOmera*, Vol. 5, No. 9 (2024).
- Rogate Telaumbanua, Gratia. "Analisis Kinerja Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Rudiadi, "Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa." *Jurnal EL-RIYASAH*, Vol. 12, No. 1 (2021).

Rohman, Mujibur, “Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Perwujudan Otonomi Desa”, Tesis Oleh: Program Magister Ilmu Hukum, Program pasca sarjana, Universitas Semarang, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

D. Al' Qur-An

Al-Qur'an Al-Karim. Surah An-Nahl ayat 90.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006.

